



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZARKANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
3. NHK : 988286

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	642.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 16.040 m2/16.040 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, Rp. 50.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 14.330 m2/14.330 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, Rp. 50.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, YAMAHA AEROX SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO SE88/SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	185.050.160
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.421.697
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	851.471.857
III. HUTANG	Rp.	885.158.129
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-33.686.272

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.